



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, pemerintah perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 2016 di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
 3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 521.34/K.573/2013 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pupuk adalah bahan kimia organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri pembuat atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikrobial, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah Barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di Sektor Pertanian.
10. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
14. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia mengusahakan lahan, budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijau pakan ternak dengan luasan tertentu.

17. Pembudidaya perikanan adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu.
18. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk pupuk bersubsidi.
19. Penyaluran di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/pembudidaya perikanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di daerah yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya perikanan.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pekebun yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 (dua) hektar atau pembudidaya perikanan dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2015.

- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirinci berdasarkan alokasi kebutuhan di daerah, jenis dan jumlah kebutuhan dan berdasarkan alokasi Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya perikanan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Koordinator Penyuluh Pertanian setempat dan diketahui Dinas Pertanian.
- (4) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli petani, pekebun, peternak dan pembudidaya perikanan.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), maka kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian.

BAB IV

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), terdiri atas pupuk An Organik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 6

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.

- c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (2) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang Spesifik Lokasi oleh Penyuluh.
 - (3) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

Pasal 7

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya perikanan di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku..
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp 2.300,- per kg; dan
 - e. Pupuk Organik = Rp 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok tani atau petani, pekebun, peternak dan pembudidaya perikanan di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg; dan
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

Pasal 9

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus Pengadaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna *pink* dan pupuk ZA bersubsidi berwarna *orange*.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengawas Harian Pupuk dan Pestisida Kabupaten dan Pengawas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT-PHP).

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Penyalur di Lini IV yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Penyalur di Lini IV yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 12 Januari 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 12 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 12 JANUARI 2016

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016**

A. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENURUT SUB SEKTOR

NO	SUB SEKTOR	JENIS PUPU (TON)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Tanaman Pangan	2440.5	635.4	309.5	3562.2	245.2
2	Hortikultura	145.2	51	18.8	216.5	26.5
3	Perkebunan	340.8	142.7	66.6	677.3	25.1
4	Peternakan	27.6	5.1	4.5	32.4	0.7
5	Perikanan Budidaya	45.9	15.8	0.6	11.7	2.6
	JUMLAH	3000	850	400	4500	300

B. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENURUT JENIS DAN SEBARAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPU (TON)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	BABULU	1213.22	323.00	152.00	1710.04	114.04
2	WARU	489.17	187.00	88.00	990.02	66.02
3	PENAJAM	791.19	238.00	112.00	1260.0	84.03
4	SEPAKU	506.43	102.00	48.00	540.01	36.01
	JUMLAH	3000	850	400	4500	300

C. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULANAN

(TON)														
NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	UREA	3000	378.92	266.700	365.24	198.069	276.036	130.30	90.98	193.215	217.620	213.294	350.892	318.723
2	SP-36	850	143.80	75.586	51.830	58.694	74.058	43.308	24.37	53.062	59.42	63.876	108.92	93.074
3	ZA	400	79.29	39.80	8.4	8.4	12.36	12.26	8.31	16.10	16.10	47.90	95.29	55.80
4	NPK	4500	761.206	400.93	282.04	319.83	402.50	228.48	130.66	287.10	322.726	326.05	553.70	484.89
5	ORGANIK	300	59.66	29.91	6.21	6.21	9.19	9.13	6.16	12.06	12.06	35.96	71.66	41.91
	JUMLAH	9050	1422.87	812.92	713.73	591.21	774.13	423.48	260.48	561.54	627.92	687.07	1180.46	994.40

JENIS PUPUK : UREA

(TON)														
NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	TANAMAN PANGAN	2440.5	292.86	219.65	341.67	170.84	244.05	97.62	73.22	170.84	195.24	146.43	244.05	244.05
2	HORTIKULTURA	145.2	8.71	5.81	11.62	13.07	15.97	18.88	5.81	5.81	5.81	17.42	17.42	18.88
3	PERKEBUNAN	340.80	68.16	34.08	6.82	6.82	10.22	10.22	6.82	13.63	13.63	40.90	81.79	47.71
4	PETERNAKAN	27.60	5.52	3.04	0.55	2.76	3.04	0.83	0.55	1.10	1.10	3.04	3.04	3.04
5	BUDIDAYA PERIKANAN	45.90	3.67	4.13	4.59	4.59	2.75	2.75	4.59	1.84	1.84	5.51	4.59	5.05
	JUMLAH	3000	378.92	267	365.24	198.1	276.04	130.3	90.981	193.22	217.62	213.29	350.89	318.72

JENIS PUPUK : SP-36

(TON)														
NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	TANAMAN PANGAN	635.4	108.02	57.19	44.48	50.83	63.54	31.77	19.06	44.48	50.83	38.12	63.54	63.54
2	HORTIKULTURA	51.0	3.06	2.04	4.08	4.59	5.61	6.63	2.04	2.04	2.04	6.12	6.12	6.63
3	PERKEBUNAN	142.7	28.54	14.27	2.85	2.85	4.28	4.28	2.85	5.71	5.71	17.12	34.25	19.98
4	PETERNAKAN	5.1	1.02	0.51	0.10	0.10	0.15	0.15	0.10	0.20	0.20	0.61	1.22	0.71
5	BUDIDAYA PERIKANAN	15.8	3.16	1.58	0.32	0.32	0.47	0.47	0.32	0.63	0.63	1.90	3.79	2.21
	JUMLAH	850	143.80	75.59	51.83	58.69	74.06	43.31	24.37	53.06	59.42	63.88	108.92	93.07

JENIS PUPUK : ZA

(TON)														
NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	TANAMAN PANGAN	309.5	61.90	30.95	6.19	6.19	9.29	9.29	6.19	12.38	12.38	37.14	74.28	43.33
2	HORTIKULTURA	18.8	3.76	1.88	0.38	0.38	0.56	0.56	0.38	0.75	0.75	2.26	4.51	2.63
3	PERKEBUNAN	66.6	13.32	6.66	1.33	1.33	2.00	2.00	1.33	2.66	2.66	7.99	15.98	9.32
4	PETERNAKAN	4.5	0.27	0.27	0.45	0.45	0.45	0.36	0.36	0.27	0.27	0.45	0.45	0.45
5	BUDIDAYA PERIKANAN	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	400	79.25	39.76	8.41	8.35	12.30	12.26	8.26	16.07	16.10	47.84	95.23	55.80

JENIS PUPUK : NPK

(TON)

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	TANAMAN PANGAN	3562.2	605.57	320.60	249.35	284.98	356.22	178.11	106.87	249.35	284.98	213.73	356.22	356.22
2	HORTIKULTURA	216.5	12.99	8.66	17.32	19.49	23.82	28.15	8.66	8.66	8.66	25.98	25.98	28.15
3	PERKEBUNAN	677.3	135.46	67.73	13.55	13.55	20.32	20.32	13.55	27.09	27.09	81.28	162.55	94.82
4	PETERNAKAN	32.4	6.48	3.24	0.65	0.65	0.97	0.97	0.65	1.30	1.30	3.89	7.78	4.54
5	BUDIDAYA PERIKANAN	11.7	0.702	0.702	1.17	1.17	1.17	0.936	0.936	0.702	0.702	1.17	1.17	1.17
	JUMLAH	4500	761.21	####	282.04	319.83	402.50	228.48	130.66	287.10	322.73	326.05	553.70	484.89

JENIS PUPUK : ORGANIK

(TON)

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	TANAMAN PANGAN	245.2	49.04	24.52	4.90	4.90	7.36	7.36	4.90	9.81	9.81	29.42	58.85	34.33
2	HORTIKULTURA	26.5	5.30	2.65	0.53	0.53	0.80	0.80	0.53	1.06	1.06	3.18	6.36	3.71
3	PERKEBUNAN	25.1	5.02	2.51	0.50	0.50	0.75	0.75	0.50	1.00	1.00	3.01	6.02	3.51
4	PETERNAKAN	0.7	0.14	0.07	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.08	0.17	0.10
5	BUDIDAYA PERIKANAN	2.6	0.156	0.156	0.26	0.26	0.26	0.208	0.208	0.156	0.156	0.26	0.26	0.26
	JUMLAH	300	59.66	29.91	6.21	6.21	9.19	9.13	6.16	12.06	12.06	35.96	71.66	41.91

D. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	1000.61	120.07	90.05	140.08	70.04	100.06	40.02	30.02	70.04	80.05	60.04	100.06	100.06
2	Waru	366.08	43.93	32.95	51.25	25.63	36.61	14.64	10.98	25.63	29.29	21.96	36.61	36.61
3	Penajam	634.53	76.14	57.11	88.83	44.42	63.45	25.38	19.04	44.42	50.76	38.07	63.45	63.45
4	Sepaku	439.29	52.71	39.54	61.50	30.75	43.93	17.57	13.18	30.75	35.14	26.36	43.93	43.93
Jumlah		2440.5	292.86	219.65	341.67	170.84	244.05	97.62	73.22	170.84	195.24	146.43	244.05	244.05

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	55.18	3.31	2.21	4.41	4.97	6.07	7.17	2.21	2.21	2.21	6.62	6.62	7.17
2	Waru	31.94	1.92	1.28	2.56	2.87	3.51	4.15	1.28	1.28	1.28	3.83	3.83	4.15
3	Penajam	40.66	2.44	1.63	3.25	3.66	4.47	5.29	1.63	1.63	1.63	4.88	4.88	5.29
4	Sepaku	17.42	1.05	0.70	1.39	1.57	1.92	2.27	0.70	0.70	0.70	2.09	2.09	2.27
Jumlah		145.2	8.71	5.81	11.62	13.07	15.97	18.88	5.81	5.81	5.81	17.42	17.42	18.88

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI

TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	129.50	25.90	12.95	2.59	2.59	3.89	3.89	2.59	5.18	5.18	15.54	31.08	18.13
2	Waru	74.98	15.00	7.50	1.50	1.50	2.25	2.25	1.50	3.00	3.00	9.00	17.99	10.50
3	Penajam	95.42	19.08	9.54	1.91	1.91	2.86	2.86	1.91	3.82	3.82	11.45	22.90	13.36
4	Sepaku	40.90	8.18	4.09	0.82	0.82	1.23	1.23	0.82	1.64	1.64	4.91	9.82	5.73
Jumlah		340.80	68.16	34.08	6.82	6.82	10.22	10.22	6.82	13.63	13.63	40.90	81.79	47.71

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	17.44	1.40	1.57	1.74	1.74	1.05	1.05	1.74	0.70	0.70	2.09	1.74	1.92
2	Waru	10.10	0.81	0.91	1.01	1.01	0.61	0.61	1.01	0.40	0.40	1.21	1.01	1.11
3	Penajam	12.85	1.03	1.16	1.29	1.29	0.77	0.77	1.29	0.51	0.51	1.54	1.29	1.41
4	Sepaku	5.51	0.44	0.50	0.55	0.55	0.33	0.33	0.55	0.22	0.22	0.66	0.55	0.61
Jumlah		45.90	3.67	4.13	4.59	4.59	2.75	2.75	4.59	1.84	1.84	5.51	4.59	5.05

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	10.49	2.10	1.15	0.21	1.05	1.15	0.31	0.21	0.42	0.42	1.15	1.15	1.15
2	Waru	6.07	1.21	0.67	0.12	0.61	0.67	0.18	0.12	0.24	0.24	0.67	0.67	0.67
3	Penajam	7.73	1.55	0.85	0.15	0.77	0.85	0.23	0.15	0.31	0.31	0.85	0.85	0.85
4	Sepaku	3.31	0.66	0.36	0.07	0.33	0.36	0.10	0.07	0.13	0.13	0.36	0.36	0.36
Jumlah		27.60	5.52	3.04	0.55	2.76	3.04	0.83	0.55	1.10	1.10	3.04	3.04	3.04

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	241.45	41.05	21.73	16.90	19.32	24.15	12.07	7.24	16.90	19.32	14.49	24.15	24.15
2	Waru	139.79	23.76	12.58	9.79	11.18	13.98	6.99	4.19	9.79	11.18	8.39	13.98	13.98
3	Penajam	177.91	30.25	16.01	12.45	14.23	17.79	8.90	5.34	12.45	14.23	10.67	17.79	17.79
4	Sepaku	76.25	12.96	6.86	5.34	6.10	7.62	3.81	2.29	5.34	6.10	4.57	7.62	7.62
Jumlah		635.4	108.02	57.19	44.48	50.83	63.54	31.77	19.06	44.48	50.83	38.12	63.54	63.54

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	19.38	1.16	0.78	1.55	1.74	2.13	2.52	0.78	0.78	0.78	2.33	2.33	2.52
2	Waru	11.22	0.67	0.45	0.90	1.01	1.23	1.46	0.45	0.45	0.45	1.35	1.35	1.46
3	Penajam	14.28	0.86	0.57	1.14	1.29	1.57	1.86	0.57	0.57	0.57	1.71	1.71	1.86
4	Sepaku	6.12	0.37	0.24	0.49	0.55	0.67	0.80	0.24	0.24	0.24	0.73	0.73	0.80
Jumlah		51	3.06	2.04	4.08	4.59	5.61	6.63	2.04	2.04	2.04	6.12	6.12	6.63

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	54.23	10.85	5.42	1.08	1.08	1.63	1.63	1.08	2.17	2.17	6.51	13.01	7.59
2	Waru	31.39	6.28	3.14	0.63	0.63	0.94	0.94	0.63	1.26	1.26	3.77	7.53	4.40
3	Penajam	39.96	7.99	4.00	0.80	0.80	1.20	1.20	0.80	1.60	1.60	4.79	9.59	5.59
4	Sepaku	17.12	3.42	1.71	0.34	0.34	0.51	0.51	0.34	0.68	0.68	2.05	4.11	2.40
Jumlah		142.7	28.54	14.27	2.85	2.85	4.28	4.28	2.85	5.71	5.71	17.12	34.25	19.98

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	6.00	1.20	0.60	0.12	0.12	0.18	0.18	0.12	0.24	0.24	0.72	1.44	0.84
2	Waru	3.48	0.70	0.35	0.07	0.07	0.10	0.10	0.07	0.14	0.14	0.42	0.83	0.49
3	Penajam	4.42	0.88	0.44	0.09	0.09	0.13	0.13	0.09	0.18	0.18	0.53	1.06	0.62
4	Sepaku	1.90	0.38	0.19	0.04	0.04	0.06	0.06	0.04	0.08	0.08	0.23	0.46	0.27
Jumlah		15.8	3.16	1.58	0.32	0.32	0.47	0.47	0.32	0.63	0.63	1.90	3.79	2.21

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	1.94	0.39	0.19	0.04	0.04	0.06	0.06	0.04	0.08	0.08	0.23	0.47	0.27
2	Waru	1.12	0.22	0.11	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.13	0.27	0.16
3	Penajam	1.43	0.29	0.14	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.06	0.06	0.17	0.34	0.20
4	Sepaku	0.61	0.12	0.06	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.07	0.15	0.09
Jumlah		5.1	1.02	0.51	0.10	0.10	0.15	0.15	0.10	0.20	0.20	0.61	1.22	0.71

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	117.61	23.52	11.76	2.35	2.35	3.53	3.53	2.35	4.70	4.70	14.11	28.23	16.47
2	Waru	68.09	13.62	6.81	1.36	1.36	2.04	2.04	1.36	2.72	2.72	8.17	16.34	9.53
3	Penajam	86.66	17.33	8.67	1.73	1.73	2.60	2.60	1.73	3.47	3.47	10.40	20.80	12.13
4	Sepaku	37.14	7.43	3.71	0.74	0.74	1.11	1.11	0.74	1.49	1.49	4.46	8.91	5.20
Jumlah		309.5	61.90	30.95	6.19	6.19	9.29	9.29	6.19	12.38	12.38	37.14	74.28	43.33

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	7.14	1.43	0.71	0.14	0.14	0.21	0.21	0.14	0.29	0.29	0.86	1.71	1.00
2	Waru	4.14	0.83	0.41	0.08	0.08	0.12	0.12	0.08	0.17	0.17	0.50	0.99	0.58
3	Penajam	5.26	1.05	0.53	0.11	0.11	0.16	0.16	0.11	0.21	0.21	0.63	1.26	0.74
4	Sepaku	2.26	0.45	0.23	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05	0.09	0.09	0.27	0.54	0.32
Jumlah		18.8	3.76	1.88	0.38	0.38	0.56	0.56	0.38	0.75	0.75	2.26	4.51	2.63

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	25.31	5.06	2.53	0.51	0.51	0.76	0.76	0.51	1.01	1.01	3.04	6.07	3.54
2	Waru	14.65	2.93	1.47	0.29	0.29	0.44	0.44	0.29	0.59	0.59	1.76	3.52	2.05
3	Penajam	18.65	3.73	1.86	0.37	0.37	0.56	0.56	0.37	0.75	0.75	2.24	4.48	2.61
4	Sepaku	7.99	1.60	0.80	0.16	0.16	0.24	0.24	0.16	0.32	0.32	0.96	1.92	1.12
Jumlah		66.60	13.32	6.66	1.33	1.33	2.00	2.00	1.33	2.66	2.66	7.99	15.98	9.32

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	0.23	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
2	Waru	0.13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3	Penajam	0.17	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
4	Sepaku	0.07	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
Jumlah		1	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	1.71	0.10	0.10	0.17	0.17	0.17	0.14	0.14	0.10	0.10	0.17	0.17	0.17
2	Waru	0.99	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10
3	Penajam	1.26	0.08	0.08	0.13	0.13	0.13	0.10	0.10	0.08	0.08	0.13	0.13	0.13
4	Sepaku	0.54	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05
Jumlah		4.50	0.27	0.27	0.45	0.45	0.45	0.36	0.36	0.27	0.27	0.45	0.45	0.45

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	1353.64	230.12	121.83	94.75	108.29	135.36	67.68	40.61	94.75	108.29	81.22	135.36	135.36
2	Waru	783.68	133.23	70.53	54.86	62.69	78.37	39.18	23.51	54.86	62.69	47.02	78.37	78.37
3	Penajam	997.42	169.56	89.77	69.82	79.79	99.74	49.87	29.92	69.82	79.79	59.84	99.74	99.74
4	Sepaku	427.46	72.67	38.47	29.92	34.20	42.75	21.37	12.82	29.92	34.20	25.65	42.75	42.75
Jumlah		3562.2	605.57	320.60	249.35	284.98	356.22	178.11	106.87	249.35	284.98	213.73	356.22	356.22

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	82.27	4.94	3.29	6.58	7.40	9.05	10.70	3.29	3.29	3.29	9.87	9.87	10.70
2	Waru	47.63	2.86	1.91	3.81	4.29	5.24	6.19	1.91	1.91	1.91	5.72	5.72	6.19
3	Penajam	60.62	3.64	2.42	4.85	5.46	6.67	7.88	2.42	2.42	2.42	7.27	7.27	7.88
4	Sepaku	25.98	1.56	1.04	2.08	2.34	2.86	3.38	1.04	1.04	1.04	3.12	3.12	3.38
Jumlah		216.5	12.99	8.66	17.32	19.49	23.82	28.15	8.66	8.66	8.66	25.98	25.98	28.15

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	257.37	51.47	25.74	5.15	5.15	7.72	7.72	5.15	10.29	10.29	30.88	61.77	36.03
2	Waru	149.01	29.80	14.90	2.98	2.98	4.47	4.47	2.98	5.96	5.96	17.88	35.76	20.86
3	Penajam	189.64	37.93	18.96	3.79	3.79	5.69	5.69	3.79	7.59	7.59	22.76	45.51	26.55
4	Sepaku	81.28	16.26	8.13	1.63	1.63	2.44	2.44	1.63	3.25	3.25	9.75	19.51	11.38
Jumlah		677.3	135.46	67.73	13.55	13.55	20.32	20.32	13.55	27.09	27.09	81.28	162.55	94.82

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	4.45	0.27	0.27	0.44	0.44	0.44	0.36	0.36	0.27	0.27	0.44	0.44	0.44
2	Waru	2.57	0.15	0.15	0.26	0.26	0.26	0.21	0.21	0.15	0.15	0.26	0.26	0.26
3	Penajam	3.28	0.20	0.20	0.33	0.33	0.33	0.26	0.26	0.20	0.20	0.33	0.33	0.33
4	Sepaku	1.40	0.08	0.08	0.14	0.14	0.14	0.11	0.11	0.08	0.08	0.14	0.14	0.14
Jumlah		11.7	0.70	0.70	1.17	1.17	1.17	0.94	0.94	0.70	0.70	1.17	1.17	1.17

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	12.31	2.46	1.23	0.25	0.25	0.37	0.37	0.25	0.49	0.49	1.48	2.95	1.72
2	Waru	7.13	1.43	0.71	0.14	0.14	0.21	0.21	0.14	0.29	0.29	0.86	1.71	1.00
3	Penajam	9.07	1.81	0.91	0.18	0.18	0.27	0.27	0.18	0.36	0.36	1.09	2.18	1.27
4	Sepaku	3.89	0.78	0.39	0.08	0.08	0.12	0.12	0.08	0.16	0.16	0.47	0.93	0.54
Jumlah		32.4	6.48	3.24	0.65	0.65	0.97	0.97	0.65	1.30	1.30	3.89	7.78	4.54

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	93.176	18.64	9.3176	1.86	1.86	2.80	2.80	1.86	3.73	3.73	11.18	22.36	13.04
2	Waru	53.944	10.79	5.3944	1.08	1.08	1.62	1.62	1.08	2.16	2.16	6.47	12.95	7.55
3	Penajam	68.656	13.73	6.8656	1.37	1.37	2.06	2.06	1.37	2.75	2.75	8.2	16.48	9.61
4	Sepaku	29.424	5.88	2.9424	0.59	0.59	0.88	0.88	0.59	1.18	1.18	3.53	7.06	4.12
Jumlah		245.2	49.04	24.52	4.90	4.90	7.36	7.36	4.90	9.81	9.81	29.42	58.85	34.33

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	10.07	2.01	1.01	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.40	0.40	1.21	2.42	1.41
2	Waru	5.83	1.17	0.58	0.12	0.12	0.17	0.17	0.12	0.23	0.23	0.70	1.40	0.82
3	Penajam	7.42	1.48	0.74	0.15	0.15	0.22	0.22	0.15	0.30	0.30	0.89	1.78	1.04
4	Sepaku	3.18	0.64	0.32	0.06	0.06	0.10	0.10	0.06	0.13	0.13	0.38	0.76	0.45
Jumlah		26.5	5.30	2.65	0.53	0.53	0.80	0.80	0.53	1.06	1.06	3.18	6.36	3.71

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	9.54	1.91	0.95	0.19	0.19	0.29	0.29	0.19	0.38	0.38	1.14	2.29	1.34
2	Waru	5.52	1.10	0.55	0.11	0.11	0.17	0.17	0.11	0.22	0.22	0.66	1.33	0.77
3	Penajam	7.03	1.41	0.70	0.14	0.14	0.21	0.21	0.14	0.28	0.28	0.84	1.69	0.98
4	Sepaku	3.01	0.60	0.30	0.06	0.06	0.09	0.09	0.06	0.12	0.12	0.36	0.72	0.42
Jumlah		25.1	5.02	2.51	0.50	0.50	0.75	0.75	0.50	1.00	1.00	3.01	6.02	3.51

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	0.988	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.10	0.10	0.10
2	Waru	0.572	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06
3	Penajam	0.728	0.04	0.04	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.04	0.04	0.07	0.07	0.07
4	Sepaku	0.312	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
Jumlah		2.6	0.16	0.16	0.26	0.26	0.26	0.21	0.21	0.16	0.16	0.26	0.26	0.26

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
TAHUN 2016 (JANUARI - DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2016											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Babulu	0.27	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.04
2	Waru	0.15	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.04	0.02
3	Penajam	0.20	0.04	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.05	0.03
4	Sepaku	0.08	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01
Jumlah		0.7	0.14	0.07	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.08	0.17	0.10

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR